

MAKALAH
PROSES AUDIT KINERJA

Disusun Guna Memenuhi Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik

Dosen Pengampu:

1. Dr. Pujiati S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Mega Metalia, M.Si., M.S.Ak., Ak., C.A.
3. Fiarika Dwi Utari S.Pd., M.Pd.



Disusun Oleh Kelompok 12

Dwi Apriyana	2313031022
Nida Yasmin Sofiyah	2313031026

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan makalah ini. Atas karunianya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul " Proses Audit Kinerja" ini dengan tepat waktu.

Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Pujiati, M.Pd., Ibu Dr. Mega Metalia, S.E., M.Si., M.S.Ak., Ak., CA., dan Ibu Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, dan seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini.

Penulis menyadari makalah ini masiih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis telah berusaha sebaik mungkin untuk menyusun makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk memperbaiki makalah ini dengan tujuan menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Bandar Lampung 07 November 2025

Kelompok 12

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1 Rumusan Masalah.....	2
1.2 Tujuan	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Pengertian Audit Kinerja.....	3
2.2 Jenis-Jenis Audit Kinerja	4
2.3 Proses Dan Tahapan Audit Kinerja	5
2.4 Manfaat Audit Kinerja	6
2.5 Karakteristik Audit Kinerja.....	8
2.6 Pemeriksaan Kinerja	10
BAB III.....	12
3.1 Kesimpulan	12
STUDI KASUS	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengelolaan sektor publik, pemerintah tidak hanya dituntut mampu menyusun laporan keuangan yang baik, tetapi juga memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, audit kinerja menjadi sangat penting sebagai alat untuk menilai apakah kegiatan dan program pemerintah telah berjalan dengan hemat, efisien, dan efektif. Audit ini merupakan bagian dari penerapan prinsip good governance, terutama ketika masyarakat semakin mengharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.

Mahmudi (2020) menjelaskan bahwa audit kinerja bukan sekadar memeriksa kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menilai proses manajemen, penggunaan sumber daya, serta pencapaian hasil suatu program. Audit kinerja sangat relevan dalam akuntansi sektor publik karena pemerintah perlu membuktikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan nilai tambah atau *value for money*.

Audit kinerja sendiri mencakup audit ekonomi, audit efisiensi, dan audit efektivitas, yang masing-masing memberikan gambaran mengenai bagaimana suatu program dikelola dan hasil apa yang dicapai. Proses audit yang dilakukan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan sampai pelaporan—memberikan dasar yang kuat bagi auditor dalam menyusun rekomendasi perbaikan yang berguna bagi manajemen.

Oleh karena itu, audit kinerja bukan hanya sarana pengawasan, tetapi juga menjadi alat pembinaan dan perbaikan berkelanjutan dalam instansi pemerintah. Audit ini membantu meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat pertanggungjawaban, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

1.1 Rumusan Masalah

1. Apakah definisi audit kinerja dalam ruang lingkup akuntansi sektor publik?
2. Apa saja jenis-jenis audit kinerja?
3. Bagaimana proses dan tahapan audit kinerja dilakukan?
4. Apa manfaat dari audit kinerja?
5. Unsur apa saja yang menjadi karakteristik audit kinerja dan membedakannya dari jenis audit lainnya?
6. Bagaimana pemeriksaan kinerja dapat membantu memperbaiki pengelolaan program publik?

1.2 Tujuan

1. Untuk mengetahui definisi audit kinerja dalam ruang lingkup akuntansi sektor publik
2. Untuk mengetahui apa saja jenis-jenis audit kinerja
3. Untuk mengetahui bagaimana proses dan tahapan audit kinerja dilakukan
4. Untuk mengetahui apa manfaat dari audit kinerja
5. Untuk mengetahui unsur apa saja yang menjadi karakteristik audit kinerja dan membedakannya dari jenis audit lainnya
6. Untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan kinerja dapat membantu memperbaiki pengelolaan program publik

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Audit Kinerja

Menurut Mahmudi (2020), audit kinerja adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai apakah suatu organisasi publik telah menggunakan sumber dayanya secara ekonomis, efisien, dan efektif (prinsip 3E) dalam mencapai tujuan. Audit ini tidak hanya menilai kepatuhan, tetapi juga mengevaluasi proses manajerial dan hasil kinerja untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Audit ini berfokus pada bagaimana organisasi melaksanakan fungsi, program, dan kegiatannya secara optimal, bukan hanya pada ketepatan pencatatan keuangan. Oleh karena itu, audit kinerja sering diterapkan pada instansi pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran negara dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks sektor publik, unit yang diaudit dapat berasal dari dua kelompok. Pertama, sektor pemerintahan, yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota, termasuk institusi nonprofit yang didanai dan dikendalikan oleh pemerintah. Kedua, perusahaan publik, yang terbagi menjadi perusahaan publik keuangan seperti bank sentral dan lembaga penyimpanan, serta perusahaan publik nonkeuangan yang dikelola oleh pemerintah.

Audit kinerja memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi, terutama dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya. Dengan adanya audit ini, manajemen organisasi dapat mengetahui kelemahan dalam implementasi program dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, hasil audit juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan yang lebih efektif. Oleh karena itu, audit kinerja berperan sebagai alat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

2.2 Jenis-Jenis Audit Kinerja

Audit kinerja pada sektor publik memiliki beberapa jenis yang diklasifikasikan berdasarkan aspek yang dinilai, tujuan pemeriksaan, serta ruang lingkup yang ingin dicapai auditor. Pembagian ini penting karena setiap jenis audit memberikan fokus evaluasi yang berbeda, sehingga hasil audit dapat digunakan lebih tepat oleh manajemen dalam memperbaiki pelayanan, penggunaan anggaran, maupun efektivitas program Pemerintah. Menurut Mahmudi (2020), audit kinerja umumnya dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu audit ekonomi (economy audit), audit efisiensi (efficiency audit), dan audit efektivitas.

1. Audit Ekonomi

Menurut Mahmudi (2020), audit ekonomi adalah pemeriksaan yang fokus untuk menilai apakah suatu entitas publik telah memperoleh sumber daya dengan biaya serendah mungkin tanpa mengurangi kualitas. Audit ini berhubungan dengan prinsip hemat atau economy, yakni kemampuan pemerintah mengadakan input dengan harga yang paling wajar. Sedangkan Bastian (2021), menjelaskan bahwa audit ekonomi menilai proses pengadaan, pembelian barang/jasa, seleksi vendor, dan aktivitas perencanaan anggaran yang berkaitan dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Pada sektor publik, audit ini relevan dalam menilai apakah instansi membeli barang dengan prosedur yang benar, harga yang kompetitif, serta menghindari pemborosan anggaran.

2. Audit Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2020), audit efisiensi mengukur hubungan antara input dan output. Entitas dikatakan efisien apabila dapat menghasilkan output maksimal dengan input minimal, atau mencapai output tertentu dengan penggunaan sumber daya yang optimal. Bastian (2021) menambahkan bahwa audit efisiensi melihat seberapa baik sistem, prosedur, SDM, sarana, dan teknologi dimanfaatkan dalam proses penyelenggaraan program. Auditor menilai adanya praktik kerja yang tidak produktif, duplikasi kegiatan, birokrasi yang berbelit, atau penggunaan tenaga kerja yang tidak optimal

3. Audit Efektivitas

Menurut Mahmudi (2020), audit efektivitas berfokus pada pencapaian tujuan program atau kegiatan. Auditor menilai apakah output dan outcome telah sesuai target. Audit ini melihat hubungan antara input-output-outcome dan dampak kebijakan secara keseluruhan.

2.3 Proses Dan Tahapan Audit Kinerja

Audit kinerja merupakan proses evaluasi sistematis untuk menilai sejauh mana program pemerintah telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Menurut Arifin (2021), audit kinerja harus dilakukan melalui tahapan yang runtut agar auditor memperoleh pemahaman mendalam mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan capaian program. Audit kinerja bersifat lengkap karena tidak hanya menilai dokumen dan laporan, tetapi juga menganalisis dampak suatu kegiatan terhadap masyarakat.

1. Tahap Perencanaan Audit Kinerja

Menurut Arifin (2021), tahap perencanaan merupakan tahap awal dari seluruh proses audit. Pada tahap ini auditor melakukan studi pendahuluan untuk memahami tujuan program, regulasi, indikator kinerja, serta risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Auditor juga menilai area-area yang berisiko tinggi namun memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan program.

2. Tahap pelaksanaan audit

Merupakan proses pengumpulan dan pengujian bukti audit. Menurut Hendrayani (2020), auditor harus mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, membaca dokumen, dan verifikasi lapangan. Auditor kemudian membandingkan fakta lapangan dengan kriteria audit untuk menilai apakah kinerja telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3. Tahap Analisis& Evaluasi Temuan Audit

Menurut Suwandi (2022), setelah bukti terkumpul, auditor memasuki tahap analisis yang bertujuan mengonfirmasi apakah temuan

tersebut telah memenuhi unsur kondisi, kriteria, penyebab, dan dampak. Evaluasi ini bersifat mendalam agar auditor dapat memastikan masalah kinerja tidak hanya disebabkan oleh kelalaian pelaksana, tetapi juga dapat berasal dari kelemahan sistem dan kebijakan.

4. Tahap Pelaporan Hasil Audit

Menurut Arifin (2021), laporan audit kinerja merupakan hasil akhir dari proses audit yang berfungsi memberi informasi kepada manajemen, legislatif, dan publik. Laporan audit harus memuat: Latar belakang audit, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi audit, temuan utama, analisis penyebab dan dampak, serta rekomendasi perbaikan.

2.4 Manfaat Audit Kinerja

a. Meningkatkan Efisiensi Proses Pelaksanaan Program

Audit kinerja membantu organisasi mengidentifikasi aktivitas yang tidak produktif, prosedur yang terlalu panjang, hingga penggunaan anggaran yang tidak sesuai kebutuhan. Melalui temuan tersebut, organisasi dapat memperbaiki alur kerja sehingga menjadi lebih cepat, lebih hemat biaya, serta lebih mudah dikendalikan. Hasil audit ini sangat penting untuk memastikan bahwa program berjalan secara efisien dan tidak menimbulkan pemborosan dalam pengelolaan sumber daya (Kartamulja, 2001).

b. Meningkatkan Efektivitas Pencapaian Tujuan Program

Melalui audit kinerja, auditor dapat menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, auditor menyampaikan rekomendasi yang membantu organisasi memperbaiki strategi pelaksanaan. Dengan demikian, audit kinerja menjadi alat yang memastikan bahwa program benar-benar memberikan hasil yang diharapkan dan memiliki dampak nyata.

c. Memperkuat Akuntabilitas Publik

Dalam sektor publik, seluruh penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Audit kinerja menyediakan laporan objektif yang menunjukkan bagaimana anggaran telah digunakan dan apakah kegiatan dilaksanakan sesuai pedoman. Laporan ini menjadi bukti transparansi yang menunjukkan bahwa organisasi bekerja secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan (Jesthy et al., 2017).

d. Menjadi Dasar dalam Pengambilan Keputusan Manajemen

Rekomendasi yang dihasilkan dari audit kinerja memberikan informasi mendalam mengenai kelemahan dan kelebihan dalam pelaksanaan program. Informasi tersebut memudahkan manajemen dalam membuat keputusan terkait revisi SOP, perubahan kebijakan, serta perbaikan kinerja unit kerja. Dengan data yang lebih terstruktur dan objektif, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan efektif (UI, 2018).

e. Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Program

Laporan hasil audit kinerja mengungkapkan bagaimana suatu program dijalankan, mulai dari penggunaan anggaran, proses pelaksanaan, hingga pencapaian hasil. Informasi tersebut dapat diakses publik, sehingga masyarakat dapat menilai sejauh mana lembaga pemerintah menjalankan tugasnya. Transparansi ini turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap integritas instansi pemerintah (Gemilang, 2020).

f. Mengidentifikasi Risiko dalam Pelaksanaan Program

Audit kinerja juga berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan program, seperti ketidakjelasan prosedur, lemahnya pengawasan, atau ketidakmampuan sumber daya manusia. Identifikasi risiko ini membantu organisasi melakukan tindakan pencegahan dan mitigasi sedini mungkin agar pelaksanaan program tidak menemui hambatan yang besar.

g. Memperbaiki Sistem Pelaporan dan Dokumentasi

Proses audit sering kali mengharuskan organisasi memperbaiki kualitas dokumentasi, laporan kegiatan, serta bukti pelaksanaan program. Dengan perbaikan tersebut, organisasi meningkatkan kemudahan dalam monitoring dan evaluasi pada periode berikutnya. Sistem pelaporan yang baik juga membantu auditor memperoleh informasi yang lengkap dan akurat.

h. Mendorong Budaya Kerja yang Profesional

Karena audit kinerja dilakukan secara berkala, pegawai cenderung lebih disiplin dan berhati-hati dalam bekerja. Mereka terdorong untuk mengikuti prosedur, menjaga kualitas pekerjaan, serta fokus pada pencapaian hasil. Dengan demikian, audit kinerja juga berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan berorientasi pada hasil.

2.5 Karakteristik Audit Kinerja

a. Berfokus pada Proses dan Hasil

Audit kinerja tidak hanya memeriksa apakah kegiatan dilakukan sesuai aturan, tetapi juga menilai apakah kegiatan tersebut memberikan hasil yang bermanfaat. Auditor melihat keseluruhan tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, penggunaan input, proses kerja, output yang dihasilkan, hingga outcome yang dirasakan oleh masyarakat. Pendekatan ini menjadikan audit kinerja sebagai evaluasi yang komprehensif dan berorientasi pada hasil nyata (Itjen Kemenperin, 2021).

b. Menggunakan Indikator dan Kriteria yang Terukur

Dalam audit kinerja, auditor menggunakan indikator yang jelas dan terukur sebagai dasar penilaian. Indikator tersebut biasanya mencakup efektivitas, efisiensi, dan ekonomi. Dengan adanya standar yang objektif, auditor dapat menilai keberhasilan program secara lebih akurat dan menghindari penilaian yang bersifat subjektif atau tidak konsisten (Itjen Kemenperin, 2021).

c. Audit yang Berorientasi pada Manajemen

Audit kinerja digolongkan sebagai audit for management karena tujuan utamanya adalah membantu manajemen meningkatkan kualitas pengelolaan program. Audit ini tidak bertujuan mencari kesalahan, melainkan memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini berbeda dengan audit keuangan yang lebih fokus pada kewajaran laporan (Ibrahim, 2016).

d. Menilai Penerapan Prinsip 3E (Economy, Efficiency, Effectiveness)

Auditor menilai apakah organisasi memperoleh sumber daya dengan biaya yang wajar (economy), menggunakan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan (efficiency), dan mencapai tujuan program sesuai rencana (effectiveness). Penilaian 3E ini menjadi landasan penting dalam menentukan apakah program telah dikelola dengan baik (Ibrahim, 2016).

e. Menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko

Sebelum melakukan audit, auditor melakukan analisis risiko untuk menentukan area mana yang paling membutuhkan perhatian. Dengan pendekatan ini, audit kinerja menjadi lebih terfokus dan dapat menghasilkan temuan yang lebih relevan dan berdampak bagi peningkatan kinerja organisasi.

f. Mengutamakan Bukti Objektif dan Terverifikasi

Setiap temuan dalam audit kinerja harus didukung dengan bukti yang kuat, seperti dokumen resmi, wawancara, observasi lapangan, dan data aktivitas. Dengan bukti yang terverifikasi, auditor dapat memberikan rekomendasi yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

g. Melibatkan Analisis Mendalam terhadap Kinerja Program

Audit kinerja tidak berhenti pada pengumpulan data, tetapi juga menganalisis hubungan antara input, proses, hasil, dan dampak. Analisis ini memungkinkan auditor memahami secara mendalam bagaimana program berjalan dan di mana letak potensinya.

2.6 Pemeriksaan Kinerja

a. Evaluasi Menyeluruh terhadap Program

Pemeriksaan kinerja dilakukan untuk menilai apakah suatu program berjalan sesuai prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Evaluasi ini tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga menilai bagaimana proses pelaksanaan dilakukan dan apakah dampaknya sesuai dengan yang direncanakan. Pemeriksaan seperti ini membantu organisasi memahami kualitas program secara menyeluruh.

b. Pemeriksaan Pengelolaan (Management Audit)

Pemeriksaan pengelolaan bertujuan untuk menilai apakah sumber daya yang dimiliki organisasi telah dikelola secara efisien dan ekonomis. Auditor meninjau struktur organisasi, pembagian tugas, sistem tata kelola, serta proses internal lainnya. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa organisasi bekerja sesuai standar dan tidak terjadi pemborosan sumber daya (Kartamulja, 2001).

c. Pemeriksaan Program (Program Audit)

Pemeriksaan program menilai sejauh mana tujuan program tercapai dan apakah manfaatnya dirasakan oleh masyarakat atau pengguna layanan. Auditor membandingkan target yang telah ditetapkan dengan realisasi di lapangan, sekaligus menilai apakah kegiatan yang dilakukan sudah cukup mendukung pencapaian hasil tersebut.

d. Memahami Program Secara Mendalam

Sebelum melakukan pemeriksaan, auditor harus memahami program melalui telaah dokumen, pedoman kerja, kegiatan lapangan, dan indikator keberhasilan. Pemahaman ini menjadi dasar penting agar audit dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai konteks program.

e. Melakukan Analisis Risiko

Auditor mengidentifikasi area yang berisiko tinggi, seperti ketidakefisienan, kesalahan prosedur, atau potensi pemborosan. Analisis risiko

ini membantu menentukan bagian program mana yang harus mendapat perhatian lebih dalam proses pemeriksaan (Jesthy et al., 2017).

f. Pengumpulan Bukti secara Sistematis

Bukti dikumpulkan melalui wawancara dengan pelaksana program, observasi langsung, pemeriksaan laporan, dan pengujian data. Bukti yang lengkap dan akurat memastikan bahwa temuan audit dapat dipertanggungjawabkan.

g. Pengujian Pengendalian Internal

Auditor menilai apakah mekanisme pengendalian internal berfungsi dengan baik dalam mencegah kesalahan, pemborosan, atau penyimpangan. Pengendalian internal yang kuat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program.

h. Penyusunan Temuan dan Rekomendasi

Setelah proses pemeriksaan selesai, auditor menyusun laporan yang berisi temuan, analisis mendalam, serta rekomendasi yang dapat membantu organisasi memperbaiki dan meningkatkan kinerja program. Rekomendasi dirancang agar dapat diterapkan secara langsung dan memberikan manfaat nyata bagi instansi.

i. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik

Pemeriksaan kinerja memberikan kontribusi penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya rekomendasi yang tepat, pemerintah daerah dapat memperbaiki tata kelola, meningkatkan efisiensi anggaran, dan menghasilkan layanan yang lebih berkualitas bagi masyarakat.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Audit kinerja merupakan alat evaluasi yang sangat penting dalam sektor publik karena memberikan penilaian menyeluruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian program pemerintah. Berbeda dengan audit keuangan yang hanya fokus pada kewajaran laporan, audit kinerja melihat apakah penggunaan anggaran benar-benar hemat, efisien, serta mencapai tujuan yang telah direncanakan. Jenis audit kinerja seperti audit ekonomi, audit efisiensi, dan audit efektivitas memperkaya analisis sehingga kelemahan program dapat diidentifikasi lebih tepat.

Pelaksanaan audit kinerja dilakukan melalui tahapan yang jelas, mulai dari perencanaan audit, pengumpulan bukti, analisis temuan, hingga pelaporan. Setiap tahap memastikan bahwa hasil audit akurat, objektif, dan bermanfaat. Melalui audit kinerja, organisasi memperoleh berbagai manfaat seperti peningkatan efisiensi proses, pencapaian tujuan yang lebih baik, penguatan akuntabilitas publik, peningkatan kualitas pelaporan, serta terbentuknya budaya kerja yang profesional.

STUDI KASUS

Kasus Audit Kinerja

Pada tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Mandiri meluncurkan Program Peningkatan Pelayanan Puskesmas (PPP) dengan anggaran sebesar Rp12 miliar. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan puskesmas melalui pengadaan alat kesehatan baru, pelatihan tenaga medis, serta digitalisasi sistem antrian pasien. Pemerintah daerah menargetkan penurunan waktu tunggu pasien hingga 40 persen dan peningkatan kepuasan masyarakat.

Namun, pada pertengahan 2025, BPK melakukan audit kinerja setelah menerima keluhan dari masyarakat. Waktu tunggu pelayanan masih panjang, banyak alat kesehatan baru tidak digunakan secara optimal, dan sebagian puskesmas belum menerapkan sistem antrian digital. Dari hasil audit diketahui bahwa 8 dari 20 puskesmas hanya menggunakan alat kesehatan kurang dari 30 persen kapasitasnya. Capaian penurunan waktu tunggu pasien hanya 15 persen, jauh di bawah target yang direncanakan.

Audit juga menemukan adanya ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran, khususnya pada pembelian alat kesehatan yang harganya lebih tinggi 20–25 persen dibandingkan harga pasar. Selain itu, rekomendasi audit internal tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti, terutama terkait pelatihan penggunaan alat medis dan implementasi sistem digital. Banyak tenaga medis mengaku belum mendapatkan pelatihan yang cukup sehingga alat baru tidak digunakan secara maksimal dan sistem antrian digital tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa tujuan program PPP dari segi efektivitas, efisiensi, dan ekonomis belum tercapai. Auditor menyimpulkan perlunya perbaikan menyeluruh, termasuk peningkatan kompetensi SDM, evaluasi proses pengadaan, serta penguatan pengawasan internal agar program dapat memberikan manfaat sesuai tujuan awal.

Pertanyaan

1. Apa penyebab utama ketidaktercapaian target penurunan waktu tunggu pasien meskipun telah tersedia anggaran dan fasilitas baru?
2. Bagaimana kurangnya pelatihan dan kesiapan SDM mempengaruhi rendahnya pemanfaatan alat kesehatan serta tidak optimalnya penerapan sistem antrian digital?

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2021). Manajemen audit sektor publik. Graha Ilmu
- Bastian, I. (2021). Audit kinerja sektor publik. Salemba Empat.
- Gemilang, R. (2020). Transparansi dalam Audit Kinerja. Jurnal Gemilang, STIEPARI Semarang.
- Hendrayani, E. (2020). Proses audit kinerja pada instansi pemerintah. *Jurnal Governance Audit*, 5(1).
- Ibrahim, I. (2016). Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik. Jurnal Akmen. Universitas Nobel Indonesia.
- Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. (2021). Pedoman Audit Kinerja. Itjen Kemenperin.
- Jesthy, J., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Analisis Pelaksanaan Prosedur Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah. Jurnal EMBA, 5(2).
- Kartamulja, A. R. (2001). Peranan Audit Kinerja dalam Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. Universitas Islam Indonesia.
- Mahmudi. (2020). *Akuntansi sektor publik* (Edisi revisi). UII Press.
- Mardiasmo. (2020). Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru). Andi.
- Satria, D., & Maulana, F. (2023). Evaluasi audit kinerja berbasis data pada program pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik Modern*, 12(2).
- Suwandi, R. (2022). Audit dan evaluasi program pemerintah. Sinar Baru Algensindo.
- Universitas Indonesia. (2018). Evaluasi Kinerja Program Pemerintah. UI Repository.